



## **TESIS**

### **Judul:**

**PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN  
NOTARIS  
OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR.  
142/Pdt.G/2019/PN PIk)**

### **Disusun oleh:**

**IIS GUSTINI  
NIM. 217202006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022**

**PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS  
PENGAWAS NOTARIS  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Plk)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

**Iis Gustini SH.**

**NIM. 217202006**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

## Persetujuan

Nama : IIS GUSTINI  
NIM : 217202006  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : Penanganan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris oleh  
Majelis Pengawas Notaris (Studi Kasus : Putusan  
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor:  
142/Pdt.G/2019/PN PIK)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 24-Juni-2022

Pembimbing:  
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,  
Dr.  
NIK/NIP: 10288010



---

## Pengesahan

Nama : IIS GUSTINI  
NIM : 217202006  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul Tesis : Penangan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris  
Oleh Majelis Pengawas Notaris (Studi Kasus : Putusan  
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN  
Palangkaraya)  
Title : Handling of violation of the code of ethics for notary  
positions by the notary supervisory board(case study  
of the decision of the palangkaraya district court  
number :142/pdt.G/2019/PN PIK)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Juli-2022.

### Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.

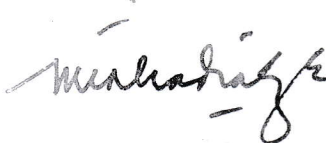
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.MH.  
Dr.  
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 22-Juli- 2022

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

# **SURAT PERNYATAAN**

Untuk Tesis Mahasiswa S2 Fakultas Hukum UNTAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
**Nama Lengkap Mahasiswa** : IIS GUSTINI  
**Nomor Induk Mahasiswa (NIM)** : 217202006  
**Nomor Induk Kependudukan (NIK)** : 3604025108840002  
**Judul Tesis** : Penanganan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris (studi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 142/pdt.G/2019/PN Plk)

sebagai penulis Tesis menyatakan bahwa :

1. Saya menjamin dan bertanggung jawab bahwa Tesis saya ini tidak mengandung unsur plagiarisme (plagiat). Apabila dikemudian hari ditemukan atau terbukti terdapat plagiat dalam Tesis saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi akademik lainnya.
2. Saya mendapatkan data (informasi) yang dipakai dalam penyusunan Tesis saya dengan cara / langkah yang benar sesuai dengan etika / tata krama, prosedur / perizinan dan peraturan yang terkait dalam hal pengambilan data (informasi) tersebut.
3. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Tarumanagara maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
4. Saya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh isi / konten yang terdapat dalam Tesis saya beserta segala dampak / risikonya.
5. Apabila dikemudian hari terjadi masalah / kasus yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan sehat serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, 20 Juni 2022

**Yang Menyatakan,**



**(IIS GUSTINI)**

## Pernyataan

Nama : IIS GUSTINI  
NIM : 217202006  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : PENANGANAN PELANGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS  
OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS (Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor. 142/PDT.G/2019/PIk)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan / atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2022

Yang menyatakan



IIS GUSTINI

## DAFTAR ISI

Hlm.

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	21
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Analisis Data.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS.....	32
A. Tinjauan Umum Jabatan Notaris.....	32
1. Pengertian Notaris.....	32
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	45
3. Kewajiban Notaris.....	47
4. Tugas dan Wewenang Notaris.....	50
5. Larangan dan Pemberhentian Notaris.....	55
B. Kode Etik Notaris.....	59
1. Pengertian Kode Etik Notaris.....	59
2. Kewajiban Etika Bagi Notaris.....	63
3. Larangan Etika Bagi Notaris.....	64
4. Sanksi Terhadap Notaris.....	65
5. Penegakan Kode Etik.....	66

C. Pertanggungjawaban Hukum Notaris.....	70
1. Pertanggungjawaban Administrasi Notaris.....	72
2. Pertanggungjawaban Perdata Notaris.....	73
3. Pertanggungjawaban Pidana Notaris.....	77
<b>BAB III PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS</b>	
<b>OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.....</b>	<b>81</b>
A. Pengawasan Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris.....	81
B. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris Pada Tingkat Majelis Pengawas Daerah (MPD).....	87
C. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris Pada Tingkat Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris.....	93
D. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pada Tingkat Majelis Pengawas Pusat Notaris.....	96
E. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris Pada Tingkat Menteri.....	98
F. Posisi Kasus.....	102
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK</b>	
<b>HORMAT TERHADAP NOTARIS YANG TERBUKTI</b>	
<b>MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS..</b>	<b>110</b>
A. Prosedur penanganan pelanggaran kode etik Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris yang oleh Pengadilan telah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menempatkan keterangan palsu dalam surat autentik.....	110
B. Penggunaan hak pembelaan sesuai Pasal 74 ayat (2 ) UU Jabatan Notaris terhadap dugaan pelanggaran kode etik Notaris di tingkat Majelis Pengawas Notaris.....	132
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>150</b>
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>152</b>



## ABSTRAK

Setiap menjalankan jabatannya, Notaris tidak saja dihadapkan pada kewajiban, namun juga dihadapkan pada larangan. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan akan berakibat hukum berupa sanksi bagi Notaris, baik secara perdata, administratif, maupun sanksi pidana. Fakta yang terjadi, pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 142/Pdt.G/2019/PN PLK, Notaris dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM RI karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran Pasal 266 *jo* Pasal 55 KUHP, sehingga terhadap Notaris yang bersangkutan dengan sendirinya telah melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Namun, dalam kasus putusan tersebut Notaris melakukan perlawanan atas penanganan dugaan pelanggaran kode etik Notaris karena tidak diberikan hak-nya untuk membela diri sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUJN dengan melakukan gugatannya ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis prosedur penanganan pelanggaran kode etik Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris yang oleh Pengadilan telah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menempatkan keterangan palsu dalam surat autentik. 2). untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana Notaris dapat menggunakan hak pembelaan sesuai Pasal 74 ayat (2) UU Jabatan Notaris terhadap dugaan pelanggaran kode etik Notaris di tingkat Majelis Pengawas Notaris ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan, *pertama*, Menteri Hukum dan HAM RI menjatuhkan sanksi hukum terhadap Notaris berupa pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 UUJN. *Kedua*, MPW Notaris dalam penanganannya tidak melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk dimintakan keterangannya, sehingga Notaris kehilangan hak-nya untuk melakukan pembelaan sesuai Pasal 74 ayat (2) UUJN. Upaya hukum yang telah ditempuh oleh Notaris yang bersangkutan adalah dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, dan upaya hukum banding di tingkat Majelis Pengawas Pusat Notaris, namun upaya hukum yang telah dilakukan oleh Notaris gagal dengan tidak dikabulkannya gugatan tersebut dengan alasan bahwa prosedur penanganan dugaan pelanggaran kode etik Notaris telah sesuai.

Kata Kunci: Pelanggaran, Notaris, Kode Etik Notaris, Majelis Pengawas Notaris.

## **ABSTRACT**

*Every time he carries out his position, a Notary is not only faced with obligations, but also faced with prohibitions. Violation of obligations and prohibitions will result in legal sanctions for Notaries, both civil, administrative, and criminal sanctions. The fact that happened, in the case of the Palangka Raya District Court Decision Number 142/Pdt.G/2019/PN PLK, the Notary was sentenced to dishonorable dismissal by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia because it was legally and convincingly proven to have committed a criminal act in violation of Article 266 in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, so that the Notary concerned has violated the UUJN and the Notary Code of Ethics. However, in the case of the decision, the Notary put up a fight against the handling of the alleged violation of the Notary's code of ethics because he was not given the right to defend himself as stipulated in Article 74 paragraph (2) of the UUJN by filing his lawsuit to the court. This study aims: 1) to analyze the procedures for handling violations of the Notary code of ethics by the Notary Supervisory Council which the Court has declared valid and convincingly guilty of committing a crime by participating in placing false information in an authentic letter. 2). to find out and analyze the extent to which a Notary can exercise his right of defense in accordance with Article 74 paragraph (2) of the Notary Position Law against alleged violations of the Notary's code of ethics at the level of the Notary Supervisory Council. The research method used is normative juridical using a law approach. The legal sources used are primary and secondary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of his research conclude, first, that the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia imposes legal sanctions on Notaries in the form of dishonorable dismissal based on the provisions of Article 13 of the UUJN. Second, the MPW Notary in its handling does not summon a Notary to be asked for a statement, so that the Notary loses his right to defend himself in accordance with Article 74 paragraph (2) of the UUJN. Legal remedies that have been taken by the Notary concerned are to file a lawsuit through the District Court, and legal efforts to appeal at the level of the Notary Central Supervisory Council, but the legal efforts that have been made by the Notary failed by not being granted the claim on the grounds that the procedure for handling alleged code violations Notary ethics are appropriate.*

*Keywords: Violation, Notary, Notary Code of Ethics, Notary Supervisory Council*